

LAPORAN KINERJA (LK)

TAHUN 2016



BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA
MEDAN, 2017

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	I
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
BAB – I PENDAHULUAN.....	
BAB – II Perencanaan Kinerja.....	
BAB – III Akuntabilitas Kinerja.....	
BAB – IV Penutup.....	

Lampiran : Perjanjian Kinerja Ta. 2016

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sehubungan dengan telah ditetapkannya RPJMD Provinsi Sumatera Utara melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 maka dokumen perencanaan Pemerintah Provinsi untuk 5 (lima) tahun kedepan harus sesuai dengan dokumen dimaksud. Dalam dokumen RPJMD tersebut terdapat visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara yang ingin dicapai untuk 5 (lima) tahun kedepan. Dokumen perencanaan tersebut juga berlaku kepada setiap SKPD yang telah menyusun Rencana Strategis dan merupakan bagian dari dokumen RPJMD tahun 2013 - 2018. Banyak terdapat Program dan Kegiatan didalamnya yang disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD untuk dilaksanakan setiap tahunnya.

Khusus SKPD Badan Kesbangpol Linmas Provsu sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 20 Tahun 2011 memiliki tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang Administrasi Umum, Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan Bangsa, Kewaspadaan Nasional, Pembinaan Politik dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat serta Tugas Pembantuan menjadi salah satu SKPD yang berperan dalam Menanamkan Ideologi kepada Masyarakat dan Generasi Muda, Menjaga stabilitas Politik dan Demokrasi di Daerah, turut serta dalam kegiatan menyangkut Ketentraman dan Ketertiban, serta pemberdayaan Masyarakat Sumatera Utara dari aspek IPOLEKSOSBUD. Secara terperinci dalam melaksanakan tugas - tugas yang telah disebutkan diatas, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan Bangsa, Kewaspadaan Nasional, Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan Bangsa, Kewaspadaan Nasional, Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat;
- c. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas dibidang Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan Bangsa, Kewaspadaan Nasional, Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat;
- d. Pelaksanaan tugas pembantuan dibidang Kesbangpol dan Linmas ;
- e. Pelaksanaan pelayanan administrasi Internal dan Eksternal;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Untuk mendukung terlaksananya Visi - Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara yang telah terdapat pada dokumen RPJMD tersebut maka telah disusun Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Kesbang Pol dan Linmas Provsu untuk tahun 2013 - 2018. Dalam dokumen RPJMD dimaksud terdapat 6 (enam) tujuan dan 6 (enam) sasaran SKPD Badan Kesbangpol Linmas Provsu didalamnya. Adapun Tujuan yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Bakesbangpol Linmas Provsu khususnya yang berkaitan dengan Program Utama SKPD yakni :

1. Tertanamnya Wawasan Kebangsaan Masyarakat
2. Terciptanya Iklim Politik dan Demokrasi Yang Baik
3. Terciptanya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

ke 3 (tiga) tujuan tersebut berkaitan dengan 3 (tiga) tujuan yang terdapat dalam dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Utara. Adapun ke 3 (tiga) tujuan RPJMD Provinsi Sumatera Utara yang berkaitan dengan tujuan Renstra SKPD Bakesbangpol Linmas Provsu tersebut adalah :

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik
2. Membangun demokrasi dan partisipasi sosial
3. Menciptakan kehidupan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Harmoni Dalam Keberagaman

Demikian halnya dengan sasaran Jangka Menengah SKPD Bakesbangpol Linmas Provsu, dari 6 (enam) sasaran yang telah ditetapkan ada 3 (tiga) sasaran yang menunjang Pelaksanaan Program Utama Bakesbangpol Linmas Provsu. Adapun sasaran tersebut adalah :

1. Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Akan Nilai-Nilai Kebangsaan
2. Meningkatnya Pemahaman Politik dan Berorganisasi Bermasyarakat
3. Terciptanya Stabilitas Keamanan dan Kenyamanan Wilayah Sumatera Utara

Dari ke 3 (tiga) sasaran tersebut telah sesuai dengan sasaran yang terdapat dalam dokumen RPJMD, khususnya sasaran :

1. Terwujudnya sistem tata pemerintahan yang baik berlandaskan hukum
2. Terwujudnya peningkatan indeks demokrasi dan partisipasi masyarakat di dalam pembangunan
3. Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang cerdas, sehat, beriman, bermoral, beretika dan berbudaya

Dengan adanya tujuan dan sasaran tersebut diharapkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk tahun 2013 – 2018 yang berkaitan dengan Tupoksi SKPD Badan Kesbangpol Linmas Provsu dapat tercapai. Sampai tahun 2016 ini telah banyak Program dan Kegiatan dilaksanakan, namun demikian dalam pelaksanaannya tentu masih terdapat kendala dan kekurangan dalam pencapaiannya seperti :

- ✓ Pagu anggaran yang diusulkan dalam RPJMD tidak sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD sehingga target – target yang ditetapkan dalam RPJMD belum tercapai, dan untuk anggaran tidak hanya SKPD Badan Kesbangpol Linmas Provsu yang mengalami kekurangan anggaran, seluruh SKPD juga mengalami hal yang sama dikarenakan adanya kebijakan rasionalisasi anggaran selama 2 (dua) tahun kebelakang.
- ✓ Terlalu tingginya target yang ditetapkan dalam RPJMD maupun Renstra SKPD mengakibatkan belum tercapainya hasil sebagaimana yang diharapkan

Dengan permasalahan tersebut maka kedepan disarankan apabila terjadi Perubahan / Revisi atas Perda Tentang RPJMD agar target yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD maupun Renstra SKPD direvisi kembali sehingga alokasi yang tersedia dapat disesuaikan dengan target yang telah ada, guna tercapainya visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kedepan.

BAB I

PENDAHULUAN

Provinsi Sumatera Utara merupakan Provinsi yang majemuk dan memiliki keanekaragaman suku, budaya, agama dan adat istiadat. Ditengah keanekaragaman tersebut maka untuk menjaga stabilitas wilayah dengan banyaknya permasalahan dimasyarakat maka Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara perlu terus mendorong pelaksanaan Program dan Kegiatan yang berkaitan dengan tugas kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan Bangsa, Kewaspadaan Nasional, Pembinaan Politik dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat . Hal ini sesuai dengan fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yakni :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan Bangsa, Kewaspadaan Nasional, Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan Bangsa, Kewaspadaan Nasional, Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat;
- c. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas dibidang Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan Bangsa, Kewaspadaan Nasional, Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat;
- d. Pelaksanaan tugas pembantuan dibidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- e. Pelaksanaan pelayanan administrasi Internal dan Eksternal;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Badan Kesbangpol Linmas Provinsi Sumatera Utara itu sendiri dipimpin oleh Kepala Badan yang mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pembinaan pegawai dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara;

- b. Menyelenggarakan arahan bimbingan kepada pejabat structural pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara;
- c. Menyelenggarakan instruksi pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara;
- d. Menyelenggarakan penyusunan program Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan ketentuan dan standart yang ditetapkan;
- e. menyelenggarakan pengkajian dan penetapan kebijakan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah di bidang kesekretarian, pembinaan ideology dan kewaspadaan nasional, pembinaan politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat;
- f. menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan pemerintahan daerah di bidang kesekretariatan, pembinaan ideologi dan kewaspadaan bangsa, kewaspadaan nasional, pembinaan politik dalam negeri dan Perlindungan masyarakat;
- g. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintah daerah di bidang kesekretariatan, pembinaan ideologi dan kewaspadaan bangsa, kewaspadaan nasional, pembinaan politik dalam negeri dan Perlindungan masyarakat;
- h. Menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi/lembaga terkait lainnya serta Badan /Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab/Kota. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di bidang kesekretariatan, pembinaan ideology dan kewaspadaan bangsa, kewaspadaan nasional, pembinaan politik dalam negeri dan Perlindungan masyarakat;
- i. Menyelenggarakan fasilitas penyelesaian perselisihan masyarakat yang berpengaruh terhadap persatuan dan kesatuan bangsa;
- j. menyelenggarakan pelayanan, pembinaan dan pengendalian perijinan dan/atau rekomendasi dibidang kesatuan Bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- k. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi perlindungan hak azasi manusia;
- l. menyelenggarakan pemberi dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah;
- m. menyelenggaraan pemantauan, pengkajian dan evaluasi permasalahan di bidang kesatuan bangsa politik dan perlindungan masyarakat;

- n. menyelenggarakan telaahan dtaf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan;
- o. menyelenggarakan tugas pembantu di Bidang Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- p. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud Kepala Badan dibantu oleh :

- Sekretaris ;
- Bidang Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan bangsa;
- Bidang Pembinaan Kewaspadaan Nasional ;
- Bidang Pembinaan Politik Dalam Negeri ;
- Bidang Perlindungan Masyarakat ;
- Kelompok Jabatan Fungsional

Atas dasar tugas dan fungsi tersebut, Badan Kesbangpol Linmas Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan tujuan dan sasaran strategis untuk 5 (lima) tahun sebagaimana terdapat dalam dokumen renstra maupun RPJMD Provinsi Sumatera Utara yang bertujuan untuk mencapai visi dan misi Pemprov. Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Program dan Kegiatan yang disusun dan capain Kinerja SKPD, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) masing – masing SKPD melalui Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 48 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang telah ditandatangani Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 18 November 2015 yang lalu.

Selanjutnya untuk menindaklanjuti Kontrak Kinerja antara Pimpinan SKPD dengan Gubernur Sumatera Utara, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga telah melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) pada tanggal 22 Juli Tahun 2016 yang lalu bertempat di Aula Martabe Kantor Gubernur Sumatera Utara. Pelaksanaan Penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) berisikan perjanjian Pimpinan SKPD dalam mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan dokumen yang tertuang dalam Formulir Perjanjian Kinerja (PK). Selanjutnya Gubernur Sumatera Utara akan memberikan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja

dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Salah satu wujud pertanggungjawaban atas dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tersebut adalah diwajibkan SKPD menyusun Laporan Trwiulan dan juga Laporan Kinerja (LK) yang akan disampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara melalui Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Utara.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan SKPD yang berisi Program dan Kegiatan untuk 1 tahun kedepan. Dokumen Rencana Kerja merupakan turunan dari dokumen Rencana Strategis Badan Kesbangpol Linmas Provsu tahun 2013 – 2018. Dokumen Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 – 2018 merupakan bagian integral dari kebijaksanaan dan program Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan ini merupakan pedoman bagi seluruh aparat dalam melaksanakan tugas - tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) Tahun.

Untuk itu mengingat pada tahun 2016 ini merupakan tahun ketiga RPJMD yang merupakan penjabaran dari Renstra SKPD selama 5 (lima) tahunan, perlu diadakan analisis terhadap hal-hal yang menyebabkan tidak tercapainya target dari program / kegiatan, untuk itu manakala terdapat revisi / perubahan atas dokumen RPJMD Provsu tahun 2013 – 2018 akan memudahkan dalam proses penyusunannya.

Dalam dokumen Renja maupun Renstra SKPD Badan Kesbangpol Linmas Provsu terdapat 8 sasaran strategis yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol Linmas Provsu. Dari 8 sasaran strategis tersebut ada 12 Indikator sasaran didalamnya. Namun demikian pada saat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKBD Badan Kesbangpol Linmas Provsu tidak seluruhnya sasaran maupun indikator dimasukkan karena ada beberapa sasaran maupun indikator yang tidak berkaitan dengan pelayanan SKPD. Untuk itu dari 8 sasaran hanya ada 3 sasaran yang menunjang 4 Indikator Kinerja Utama Badan Kesbangpol Linmas Provsu.

2.1 VISI

Untuk memperoleh gambaran dan sasaran serta target yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan sebagaimana tertuang pada dokumen Renstra SKPD, maka Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan visi " Merajut Keberagaman, Memperkokoh Demokrasi Guna Mewujudkan Ketahanan Sumatera Utara Yang Damai dan Sejahtera "

2.2. MISI

Dalam mencapai sebuah visi maka diperlukan misi – misi di dalam pelaksanaannya, untuk itu Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara telah menyusun misi sebagai berikut :

Misi Pertama

Membangun Identitas, Karakter dan Talenta Bangsa Melalui Sekolah Kebangsaan Misi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang makna berbangsa dan bernegara khususnya tentang 4 pilar kebangsaan.

Misi Kedua

Meningkatkan Toleransi Beragama dan Merajut Keberagaman di Sumatera Utara. Misi ini bertujuan untuk menjaga kerukunan umat Bergama di Sumatera Utara dan meningkatkan sikap saling menghargai antar kelompok masyarakat Sumatera Utara yang heterogen.

Misi Ketiga

Mendorong Penguatan Koordinasi dan Komunikasi Dengan Instansi Terkait. Misi ini bertujuan menjaga dan memelihara stabilitas wilayah Sumatera Utara guna mewujudkan daerah yang aman , tentram dan damai.

Misi Keempat

Mendayagunakan keberadaan ORMAS / LSM dan Lembaga Nirlaba Lainnya di Sumatera Utara. Misi ini bertujuan untuk memberdayakan dan melibatkan Ormas, LSM dan Lembaga Nirlaba lainnya yang berkaitan dengan SKPD Kesbang Pol dalam Pembangunan Sumatera Utara sehingga tujuan dan cita-cita Provinsi Sumatera Utara segera tercapai.

Misi Kelima

Memberdayakan Masyarakat Dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Wilayah Sumatera Utara. Misi ini bertujuan untuk melibatkan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban wilayah Sumatera Utara.

Misi Keenam

Memantapkan Kondisi Ideologi, Sosial Politik, Seni Budaya, Agama dan Ekonomi di masyarakat Sumatera Utara.

2.3 TUJUAN

Sebagai hasil akhir dari sebuah visi dan gambaran yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun berikut ini diuraikan tujuan dari Badan Kesbang Politik dan Perlindungan Masyarakat atas rencana yang telah dikemukakan tadi sebelumnya sebagai berikut :

- ❖ Tertanamnya Wawasan Kebangsaan bagi masyarakat
- ❖ Terciptanya Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat
- ❖ Terciptanya Iklim Politik dan Demokrasi Yang Baik

2.4 SASARAN STRATEGIS

Adapun Sasaran Strategis akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun (2013-2018) sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

- Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Akan Nilai - Nilai Kebangsaan
- Meningkatnya Pemahaman Politik dan Berorganisasi Masyarakat
- Terciptanya Stabilitas Keamanan dan Kenyamanan Wilayah Sumatera Utara

2.4 PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2016

Sebagaimana telah dikemukakan pada Bab sebelumnya bahwa pada tahun 2016 telah dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) Pimpinan SKPD dengan Gubernur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Badan Kesbangpol linmas Provsu dapat dijelaskan sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Akan Nilai - Nilai Kebangsaan	Jumlah Kegiatan Dalam Rangka Pembinaan Wawasan Kebangsaan	9 Kegiatan
2	Meningkatnya Pemahaman Politik dan Berorganisasi Masyarakat	Jumlah LSM / Ormas / OKP Yang Mendapatkan Pembinaan	100 Ormas
		Jumlah Parpol Yang Mendapatkan Pembinaan	11 Parpol
3	Terciptanya Stabilitas Keamanan & Kenyamanan Wilayah Sumatera Utara	Jumlah Kegiatan Dalam Rangka Deteksi Dini dan Cegah Dini Konflik	7 Kegiatan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sesuai dengan dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Indikator Kinerja, pada tahun 2016 Badan Kesbangpol Linmas Provsu telah mengusulkan 4 (empat) Program utama yang didukung 20 (dua puluh) kegiatan untuk mencapai target yang terdapat pada Sasaran Strategis sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2016 dimaksud. Mengenai alokasi anggaran tahun 2014 belanja tidak langsung sebesar Rp. 7.649.357.200 dan belanja langsung sebesar Rp. 11.619.434.257 dengan total pagu Rp.19.268.791.457. Untuk tahun 2015 belanja tidak langsung sebesar Rp. 7.931.433.000 dan belanja langsung sebesar Rp. 10.623.951.175 dengan total pagu Rp. 18.555.384.175 sedangkan untuk tahun 2016 belanja tidak langsung sebesar Rp. 8.812.474.650 dan belanja langsung sebesar 12.600.000.000 dengan total pagu Rp. 21.412.474.650. Untuk melihat sejauh mana Pelaksanaan Program / Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2016 yang terdapat dalam dokumen Perjanjian Kinerja tersebut akan dijelaskan pada Bab Akuntabilitas Kinerja ini.

Untuk belanja tidak langsung dipergunakan untuk biaya Pegawai Negeri Sipil yang adadi Badan Kesbangpol Linmas Provsu, sedangkan untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan dianggarkan melalui Belanja Langsung baik Program yang bersifat Rutin maupun Program Utama yang menyangkut pelayanan SKPD. Program utama inilah yang dipergunakan untuk mendukung sasaran strategis yang terdapat dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesbangpol Linmas Provsu. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Indikator Kinerja Utama maka Badan Kesbangpol Linmas Provsu memiliki 3 (tiga) sasaran didalamnya dengan 4 (empat) indikator.

Pada tahun 2014 dan 2015 ada beberapa Program yang mendorong pencapaian lebih dari 1 (satu) sasaran sehingga berpengaruh terhadap pencapaian target yang ditetapkan, akan tetapi untuk tahun 2016 satu Program dipergunakan untuk mendukung tercapainya 1 (satu) sasaran. Untuk melihat sejauh mana pencapaian masing – masing sasaran pada Bab

ini akan dijelaskan mengenai sejauh mana pencapaian target dari masing – masing sasaran dimaksud.

❖ **SASARAN PERTAMA : MENINGKATNYA PEMAHAMAN MASYARAKAT AKAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN**

Pada sasaran ini terdapat Indikator Jumlah Kegiatan Dalam Rangka Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan target yang ditetapkan untuk tahun 2016 adalah 9 (sembilan) kegiatan. Dari 9 (sembilan) target kegiatan yang ditetapkan pada sasaran ini terealisasi sebanyak 9 (tujuh) kegiatan atau terlaksana 100 % (seratus Persen). Dengan demikian dari target yang ditetapkan dalam sasaran ini tercapai sebagaimana yang telah diperjanjikan antara Gubernur Sumatera Utara dengan Pimpinan SKPD. Keseluruhan target tertuang pada Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan.

Seluruh kegiatan yang ada pada sasaran pertama ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan nilai – nilai kebangsaan, seperti pemahaman masyarakat akan 4 (empat) konsensus dasar nasional yakni : Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Ke - 4 (empat) konsensus dasar ini harus tetap terjaga dan terpelihara di masyarakat, khususnya para generasi muda yang akan melanjutkan pembangunan bangsa ini. Saat ini sifat – sifat masyarakat yang cenderung individualistis, egois, merupakan contoh – contoh kecil dari budaya asing yang sudah mulai membudaya di masyarakat. Untuk itu revitalisasi nilai – nilai 4 (empat) konsensus dasar ini dilakukan melalui sosialisasi, seminar ataupun dialog kepada masyarakat.

Adapun pelaksanaan Program / Kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran ini, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pada Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan terdapat 8 (delapan) kegiatan dengan penjelasan sebagai berikut :

- [Sosialisasi Penetapan 4 Konsensus Dasar Nasional bagi Kaum Perempuan](#)



Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan II, dan sudah dilaksanakan di Tanjung Balai pada tanggal 4 Juni 2016 dengan mengundang 150 orang peserta dari Tanjung Balai khusus dari kaum perempuan. Sosialisasi 4 Konsensus Dasar Nasional dimaksudkan agar wawasan kebangsaan kepada masyarakat terus terpelihara dan terjaga demi keutuhan Bangsa dan Negara adapun alokasi Anggaran sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah :

- ✓ Terlaksananya Program sesuai dengan tugas pokok yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.
- ✓ Meningkatnya emansipasi kaum perempuan dalam mendukung persatuan dan Kesatuan Bangsa.
- ✓ Peran Pemerintah dalam menjaga harmonisasi Keberagaman.

Adapun Narasumber yang diundang pada kegiatan tersebut adalah :

- 1) Drs. ZULKIFLI TAUFIK, SH,M.Hum (Plt. KABAN KESBANGPOL PROVSU)
- 2) HJ. DELIMA,SPD,M,M (KABAN KESBANGPOL TANJUNG BALAI)
- 3) HJ, ERNAWATI.SIP,MM
- 4) Drs. MUHAMMAD.D

- [Dialog Peran Gender dalam mengantisipasi Bahaya Narkoba, Judi, Portitusi dan Penyakit Masyarakat.](#)





Kegiatan ini dilaksanakan di Batu Bara tanggal 8 Oktober 2016 dengan mengundang peserta 150 orang peserta dari Sekolah – Sekolah yang ada di Kabupaten Batu Bara yang terdiri dari 75 laki-laki dan 75 perempuan. Dengan Alokasi Anggaran 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah :

- ✓ Kasus Narkoba, Judi, Portitusi sudah membahayakan di Masyarakat Upaya penanggulangan Narkoba memberi Pendidikan Agama sejak Dini
- ✓ Pembinaan kehidupan rumah tangga yang harmonis dengan penuh perhatian dan kasih sayang
- ✓ menjalin komunikasi yang kondusif antara orang tua dan anak anak – anak diberikan pengetahuan sedini tentang bahaya nya Narkoba
- ✓ Pertemuan para guru dan orang tua agar dikomunikasikan dengan baik dan dipecahkan bersama dan di cari upaya preventif penanggulan narkoba ini di kalangan Siswa/i atau pun di masyarakat khususnya di Batubara.

Adapun Narasumber yang diundang pada kegiatan tersebut adalah :

- 1) Drs. ZULKIFLI TAUFIK, SH,M.Hum (Plt. KABAN KESBANGPOL PROVSU)
- 2) SAT BINMAS POLRES BATU BARA
- 3) KABAN BATU BARA

- [Media Pembauran Kebangsaan](#)

Media ini dijadikan sebagai salah satu sarana untuk memberikan informasi terkini ditingkat Nasional maupun Daerah, media ini dan dapat diakses juga pada Web resmi Bakesbangpol Linmas Provsu yang terdaftar di sumutprov.go.id. Disamping itu, Laporan Pelaksanaan Program / Kegiatan yang sedang, akan, maupun yang telah dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Linmas Provinsi Sumatera Utara juga dapat terlihat pada media ini, sehingga masyarakat tahu akan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan. Seperti yang telah diuraikan diatas tema – tema yang diangkat pada majalah ini juga disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Pada tahun 2016 ada 6 edisi yang diterbitkan dengan mengambil tema – tema yang sedang berkembang seperti :

1. Narkoba Akar Persoalan Masyarakat dan juga terkait Organisasi Gafatar
2. Ajakan Gubsu kepada para tokoh asal Sumatera Utara untuk membangun Daerah dan juga tema terkait Membangun Desa Untuk Indonesia
3. terkait Pelantikan Gubernur Sumut oleh Presiden RI dan juga tema terkait ajakan untuk Waspada Bahaya Laten Komunis
4. terkait ajakan Gubsu kepada pengusaha di Sumut untuk mendukung Program Amnesti Pajak dan juga tema terkait Menata Keberagaman Indonesia
5. Target 1 juta wisatawan di Sumut pada tahun 2019 dan juga tentang Krisis Karakter Bangsa
6. Dukungan Pemprovsu untuk program Sapu Bersih Pungli dan juga masalah Disintegrasi Bangsa.

Untuk Alokasi anggaran yang disediakan pada tahun 2016 ini adalah sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah)

- [Forum Dialog Penguatan 4 Konsensus Dasar Nasional bagi Siswa/i dan mahasiswa Sumut.](#)

Kegiatan ini disosialisasikan agar nilai-nilai 4 pilar kebangsaan tidak pudar dan menjadi pedoman bagi generasi penerus Bangsa dilaksanakan selama 2 (hari) di MAN2 Medan tanggal 23-24 November 2016 dengan tema “Dalam Tegaknya Keutuhan NKRI mari kita implementasikan 4 konsensus dasar nasional dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara” mengundang peserta 200 orang peserta, Adapun Narasumber yang diundang pada kegiatan tersebut adalah :

1. Kepala Badan Kesbangpol Linmas Provsu
2. Kepala Bidang Pemb Ideologi & Kewaspadaan Bangsa
3. DR.H.Arifinsyah, M.Ag (Dari Forum Pembauran Kebangsaan)

- [Fasilitas Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan..](#)

Kegiatan ini hanya rapat Koordinasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2016 di Aula Kerukunan Bakesbangpol dan Linams Provinsi Sumatera Utara, Adapun hasil rapat :

1. Membentuk kelompok kerja Wawasan Kebangsaan Provinsi Sumatera Utara tahun 2017 berdasarkan 4 (empat) kelompok kerja :
 - a. Kelompok kerja pembuatan modul dan tot terdiri dari, USU, Unimed, Asisten Teritorial Kodam I / BB dan Bakesbangpol dan Linmas.
 - b. Kelompok kerja hubungan kerjasama terdiri dari, Kepala Badan Intelijen Daerah Provsu, Bimas Poldasu, FKUB dan FPB Provsu.
 - c. Kelompok kerja Advokasi dan Publikasi terdiri dari Pemred harian Waspada, DHD 45 Provsu dan DPRDSU.
 - d. Perencanaan kegiatan terdiri dari, Bappedasu, Dinas Pendidikan, Badan Pusat Statistik Provsu dan KNPI Sumatera Utara
2. Melaksanakan Pertemuan secara rutin yang akan diawali pada bulan Februari 2017.
3. Membuat perencanaan dan jadwal kegiatan pada tahun 2017
4. Bidang I (satu) supaya melakukan pendataan keberadaan PPWK di Kab/Kota se Sumatera Utara.
5. Kodam I/BB supaya menyiapkan Modul-modul kegiatan dan materi-materi yang berkaitan dengan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara

- [Pembinaan dan Peningkatan Pembauran melalui Pemberdayaan Forum Pembauran Kebangsaan \(FPK\) Provsu.](#)

Kegiatan yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 di Aula Bina Graha Bappeda Provsu dengan tema “ Melalui revolusi mental bangsa kita tingkatkan rasa nasionalisme untuk membangun Provinsi Sumatera utara yang bersinergi dan berdaya saing “dan dibuka oleh bapak Plt Gubernur Sumatera Utara dengan mengundang peserta dari tokoh masyarakat, tokoh

adat, aktivis, tokoh pemuda dan tokoh agama Adapun Narasumber yang diundang pada kegiatan tersebut adalah :

1. Prof. DR. ABDUL MUNIR ,MPD.
2. DRS. ZULKIFLI TAUFIK ,M.HUM.
3. DRS. AFIFUDDIN LUBIS ,MM.
4. DR. ARIFIN SAH, M.AG.
5. H. BUSTAMI USMAN, SE

- [Pembinaan dan Peningkatan Kerukunan Umat Beragama melalui Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama \(FKUB\) Provsu.](#)

Dalam memberdayakan Masyarakat (umat) untuk membangun kepribadian bangsa yang berkarakter_kita harus mampu memberdayakan masyarakat yang menjadi agen perubahan, dilakukan secara terencana untuk membangun kepribadian yang mandiri (kemandirian) dengan nilai krakter Religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, inovatif, mandiri, demokrasi, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, mengembangkan prestasi, bersahabat/kekeluargaan, cinta damai, gemar membaca,peduli lingkungan, peduli sosial dan tanggungjawab dalam ruang lin gkup keluarga, lingkup satuan penduduk, lingkup satuang Pemerintah, lingkup dunia usahadan industri dan lingkup dunia Pendidikan.

Kegiatan Rapat Koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama yang dilaksanakan selama 2 (hari) di Griya Hotel Medan pada tanggal 1 sd 3 juni 2016 dengan mengundang 100 orang peserta dari Pengurus Forum Kab/Kota dan juga utusan masing – masing Agama, acara ini dibuka oleh Gubernur Sumatera Utara. Adapun tema adalah “Melalui Rakor Kita Tingkatkan Sinergitas FKUB Provsu, Kab/Kota dalam melaksanakan Program dan Kegiatan untuk menjaga Harmonisasi Kebangsaan” Adapun Narasumber yang diundang pada kegiatan tersebut adalah :

1. KETUA UMUM MUI SUMUT
2. USKUP AGUNG MEDAN
3. KETUA PHDI SUMUT
4. KETUA UMUM PGI SUMUT
5. KETUA WALUBI SUMUT
6. KETUA MATAKIN SUMUT
7. DRS. H. TOHAR BAYOANGIN,M.Ag

8. KETUA FKUB SUMUT
9. DRS. ZULKIFLI TAUFIK,SH,M.HUM
10. DRS. ZULKARNAIN,MA
11. DR.H.ARIFINSYAH,M.Ag
12. BISHOP DR.J.H. MANURUNG
13. DRS.H.AMAS MUDA SIREGAR,MBA,MM

- [Pembinaan Fasilitas Tim Pemantau dan Evaluasi Pengembangan Pelestarian Budaya Daerah Provsu](#)

Kegiatan ini dilaksanakan di Bina Graha tanggal 23 Agustus 2016 dengan mengundang peserta 100 orang peserta. Dengan Alokasi Anggaran 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah). Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah mempersatukan kembali masyarakat majemuk di Asia Tenggara dalam satu rumpun melayu, dalam masyarakat ASEAN kelompok melayu akan menjadi mayoritas dan menentukan jati diri orang melayu di bentuk dari Agama, banyak kesenian-kesenian terkikis di pengaruhi budaya luar.

Adapun Narasumber yang diundang pada kegiatan tersebut adalah :

- 1) Prof. USMAN PELLY, Ph.D
- 2) Drs.MUHAMMAD TAKARI, M.Hum,Ph.d
- 3) SYARIFUDDIN SIBA
- 4) Drs. ZULKIFLI TAUFIK, SH,M.Hum (Plt. KABAN KESBANGPOL PROVSU)

[Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan terdapat 1 \(satu\) kegiatan dengan penjelasan sebagai berikut :](#)

- [Peningkatan Kesadaran Bela Negara.](#)

Bela Negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan petinggi suatu Negara tentang patriotisme seseorang, yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari di Raja Bahagia resto, Jl. Arteri Kota Tanjung Balai tanggal 19 - 20 Oktober 2016 dengan tema "Implementasi nilai-nilai Nasionalisme dan Patriotisme untuk menumbuhkan Rasa Cinta Tanah Air" mengundang peserta 150 orang

peserta dari Siswa-siswi SMA di Tanjung Balai. Dengan Alokasi Anggaran 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah :

- ✓ Terlaksananya Program sesuai dengan tugas pokok yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.
- ✓ Penguatan Bela Negara dan dampak narkoba.

Adapun Narasumber yang diundang pada kegiatan tersebut adalah :

- 1) Drs. ZULKIFLI TAUFIK, SH,M.Hum (Plt. KABAN KESBANGPOL PROVSU)
- 2) STAF AHLI GUBERNUR SUMATERA UTARA.
- 3) KAPOLRES TANJUNG BALAI
- 4) DANDIM 0208.
- 5) KABAN KESBANGPOL KOTA TJ. BALAI

Untuk melihat sejauh mana perbandingan target maupun pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan pada sasaran pertama ini, dapat kita lihat pada table berikut ini:

**Perbandingan Target Renstra SKPD / IKU dengan Target Yang Ditetapkan
Dalam Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) SKPD Bakesbangpol Linmas Provsu Tahun
2014**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET Renstra / IKU	TARGET Perjanjian Kinerja (PK) 2014	Realisasi Ta 2014	Presentase
Meningkatnya Pemahaman Masyarakat akan Nilai-nilai Kebangsaan	Jumlah Kegiatan dalam rangka Pembinaan Wawasan Kebangsaan	47 Kegiatan	11 Kegiatan	11 Kegiatan	100 %

**Perbandingan Target Renstra SKPD / IKU dengan Target Yang Ditetapkan
Dalam Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) SKPD Bakesbangpol Linmas Provsu Tahun
2015**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET Renstra / IKU	TARGET Perjanjian Kinerja (PK) 2015	Realisasi Ta 2015	Presentase
Meningkatnya Pemahaman Masyarakat akan Nilai-nilai Kebangsaan	Jumlah Kegiatan dalam rangka Pembinaan Wawasan Kebangsaan	47 Kegiatan	8 Kegiatan	7 Kegiatan	87,5 %

**Perbandingan Target Renstra SKPD / IKU dengan Target Yang Ditetapkan
Dalam Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) SKPD Bakesbangpol Linmas Provsu Tahun
2016**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET Renstra / IKU	TARGET Perjanjian Kinerja (PK) 2016	Realisasi Ta 2016	Presentase
Meningkatnya Pemahaman Masyarakat akan Nilai-nilai Kebangsaan	Jumlah Kegiatan dalam rangka Pembinaan Wawasan Kebangsaan	47 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	100 %

❖ SASARAN KEDUA : MENINGKATNYA PEMAHAMAN POLITIK DAN BERORGANISASI MASYARAKAT

Pada sasaran ini terdapat 2 (dua) Indikator didalamnya yakni : Jumlah LSM / Ormas/ OKP yang mendapatkan pembinaan serta Jumlah Parpol yang mendapatkan pembinaan. Untuk Indikator Jumlah Parpol yang mendapatkan pembinaan dengan target 11 Parpol sedangkan Ormas / LSM yang mendapatkan pembinaan ada 100 Ormas / LSM yang menjadi target, keseluruhan target tersebut dilaksanakan pada Program /kegiatan sebagai berikut :

Program Pendidikan Politik Masyarakat terdapat 4 (empat) kegiatan yakni :

- Seri Dialog Demokrasi
- Pendidikan Politik bagi Kader-kader PKK dan Organisasi Wanita
- Penguatan Kelompok Kerja Penyusun Indeks Demokrasi Indonesia provsu
- Verifikasi PAW Anggota DPRD Kab/Kota se Sumut

Indikator yang kedua adalah Jumlah LSM/Ormas/OKP yang mendapatkan Pembinaan. Indikator ini terdapat 100 Ormas/LSM menjadi target pembinaan. Adapun kegiatan yang mendukung pencapaian target pada indikator ini terdapat pada :

- Seri Dialog Demokrasi

Kegiatan ini dilaksanakan ada 8 kali yaitu :

- I. Kegiatan pertama dilaksanakan tanggal 3 Mei 2016
- II. Kegiatan yang kedua dilaksanaka hari Selasa, 14 Juni 2016 di Aula BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS PROVSU dengan tema” Kebangsaan menyampaikan pendapat menuju iklim investasi yang kondusif di Sumatera Utara” mengundang peserta dari Partai Politik, Serikat buruh / Pekerja, Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Adapun narasumber :
 - N. MANALU (SPSI)
 - Drs. ZULKIFLI TAUFIK, SH, M.Hum (KASAT POL PP).
 - MUKMIN (DISNAKER)
 - Kombes RUDI HARTONO (KARO OPS).
 - FIRDAUS HUTASUHUT (KESBANGPOL PROVSU)
 - LAKSAMANA (SEK. APINDO).



III. Kegiatan ketiga dilaksanakan hari Rabu, 03 Agustus 2016 di Aula BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS PROVSU dengan tema “ Kode etik, rekrutmen dan kaderisasi Partai politik dengan narasumber :

- Drs. ZULKIFLI TAUFIK, SH, M.Hum (KABAN KESBANGPOL PROVSU).
- Akademisi Fisip USU
- Fisip USU (Ketua Parpol Golkar Sumut).

IV. Kegiatan keempat dilaksanakan Tanggal 20 Oktober 2016 di Ruang sidang Fisip USU Jl. DR. Syofian kampus USU Medan dengan tema” HATE SPEECH” dengan jumlah peserta 100 Orang dari Mahasiswa dan Mahasiswi Fisif USU. Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah :

- Terlaksananya Program sesuai dengan tugas pokok yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Hate Speech saat ini mengalami trend peningkatan seiring dengan perkembangan media sosial sehingga harus di atur batasan maupun yang menjadi substansi hate speech.
- Aparat penegak hukum secara simultan harus mengupdate semua sosial media adar dapat mengelimir gesekan akibat hate speech.
- Waspada terhadap pengguna hate speech di media sosial dan interaksi sehari – hari.

Narasumber kegiatan :

- DR. MUZDALIFAH (AKADEMIS)
- KOMPOL. JUNANTO (TELEMATIKA POLDASU)
- ACHMAD FIRDAUS HUTASUHUT, SH,MSI (KESBANGPOL PROVSU)

V. Kegiatan kelima dilaksanakan hari Sabtu, 29 Oktober 2016 di AULA SMA MUHAMMADIYAH 2 TANJUNG SARI MEDAN, dengan tema “ Politik dan Pluralisme dalam Berbangsa dan Bernegara” mengundang Siswa SMA Muhammadiyah 2 Medan dengan jumlah peserta 100 Orang, Adapun narasumber :

- Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara (yang mewakili)
- Drs. ZULKIFLI TAUFIK, SH, M.Hum (KABAN KESBANGPOL PROVSU).
- ABDUL MANAF,SH,MH (FUNGSIONAL PARTAI POLITIK)

VI. Kegiatan keenam dilaksanakan hari Sabtu, 12 November 2016 di AULA FAKULTAS DAKWA UIN Sumatera Utara dengan tema “ BHINEKA TUNGGAL IKA DALAM DEMOKRASI BERBASIS PANCASILA “ adapun narasumber :

- AHMAD KHAIRUDDIN, MSI (DOSEN UIN SUMATERA UTARA FAK. ILMU TARBIYA DAN KEGURUAN)
- Drs. ZULKIFLI TAUFIK, SH, M.Hum (KABAN KESBANGPOL PROVSU).

- SHOHIBUL AZMI SIREGAR, SH (ORGANISASI KEPEMUDAAN ISLAM SUMATERA UTARA).

VII. Kegiatan ketujuh dilaksanakan tanggal 28 November 2016 di Aula Institut Teknik Medan Jl. Gedung Arca Medan dengan tema “ Sumber daya mineral sebagai kekuatan ekonomi Sumatera Utara“ mengundang 100 Orang Mahasiswa Institut Tehnologi Medan. Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah :

- Terlaksananya Program sesuai dengan tugas pokok yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Indonesia khususnya Sumatera Utara sumberdaya mineral dan hasil bumi nya sangat potensial sebagai penyokong perekonomian.
- Sumberdaya mineral yang hendaklah dapat menjadi sumber kehidupan Masyarakat sekitar.

Narasumber kegiatan tersebut :

- IKRIMAH HAMIDY (FRAKSI PKS DPRDSU).
- HERI ADHARI, ST.MT (PENGAMAT GEOLOGI).
- AF. HUTASUHUT (KESBANGPOL PROVSU).

VIII. Kegiatan terakhir dilaksanakan tanggal 8 Desember 2016 di Aula Kelurahan Binjai Jl. HM Joni (Pasar Merah) Medan. Dengan mengundang 100 Orang Mahasiswa, Masyarakat dan pelaku UKM Kota Medan. Dengan Narasumber Kegiatan tersebut :

- BOIDO PANJAITAN, ST (FRAKSI PDIP KOTA MEDAN)
- SUSWANTO (DIREKTUR EKSKUTIF BITRA PENGAMAT EKONOMI)
- Drs. ZULKIFLI TAUFIK, SH, M.Hum (KABAN KESBANGPOL PROVSU).
- [Pendidikan Politik bagi Kader – Kader PKK dan Organisasi Wanita](#)





Kegiatan ini dilaksanakan di Bina Graha tanggal 28 April 2016 dengan mengundang peserta ±100 orang peserta dari Ibu PKK, Darma Wanita, Organisasi Wanita, BKOW, Muslimat NU, AISIAH, PWKI, IKWIW. Dengan Alokasi Anggaran 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah :

- ✓ Peningkatan kapasitas perempuan dalam berpolitik
- ✓ Memberikan hak yang sama antara laki-laki dengan perempuan untuk menggunakan hak-haknya di berbagai bidang termasuk di bidang politik tentang hak memilih dan dipilih.
- ✓ Memberikan pemahaman kepada ibu – ibu penggerak PKK tentang Peraturan dan Perundangan Pendidikan Politik
- ✓ Tertampungnya masukan dan ide terkait pemberdayaan kaum perempuan dalam hal peran serta di dunia politik
- ✓ Mendapatkan solusi konstruktif terkait pendidikan politik khusus kepada kaum yang termarginalkan (perempuan)

Adapun Narasumber yang diundang pada kegiatan tersebut adalah :

1. EVI NOVIDA GINTING (KOMISIONER KPU)
2. NUR HASANNAH, S.Sos (Ketua KAUkus PEREMPUAN POLITIK INDONESIA SUMUT)
3. SOHIBUL ANSYOR SIREGAR (DOSEN FISIP UMSU)
4. A.F HUTASUHUT (Mewakili PLT. Bakesbangpol dan Linmas Provsu)

- [Penguatan Kelompok Kerja Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia Provsu](#)



Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Kebangsaan Bakesbangpol dan Linmas Provsu tanggal 2 September 2016 dengan tema “ Rapat Kajian dan Penguatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016, mengundang peserta orang. Dengan Alokasi Anggaran 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Adapun Narasumber yang diundang pada kegiatan tersebut adalah :

1. Drs. ZULKIFLI TAUFIK, SH,M.Hum (Plt. KABAN KESBANGPOL PROVSU)
2. Perwakilan Badan Pusat Statistik Sumatera Utara (BPS)
3. Perwakilan Universitas Sumatera Utara (USU)

- [Verifikasi PAW Anggota DPRD Kab/Kota se Sumut](#)

Hasil dari verifikasi pada tahun 2016 ada 15 orang anggota DPRD Kab/Kota yang diusulkan untuk di PAW melalui keputusan Gubernur Sumatera Utara, anggota dewan tersebut adalah :

1. Umbal Pasaribu diusulkan oleh Partai Hanura Kab Tapteng PAW pada bulan Desember 2016
2. Habeli Gulo diusulkan oleh Partai Hanura Kab Nias PAW pada bulan Januari 2016
3. Ir Johannes Berutu diusulkan oleh Partai Nasdem Kabupaten Dairi PAW bulan Januari 2016
4. Lo'osokhi Gulo diusulkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Sibolga bulan Desember 2016
5. Manat Sigalingging S.Pd diusulkan oleh Partai Hanura Kabupaten Dairi bulan Januari 2016
6. Milter Sinaga, SH diusulkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Labuhan Batu bulan Maret 2016
7. Nixon Pendi P Simajuntak dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kota Sibolga bulan Oktober 2016
8. Mesachi Zebua, SIP dari partai Gerindra Kabupaten Nias Barat bulan Desember 2015
9. Padeli Ashari Hasibuan, SE dari Partai Demokrat Kabupaten Padang Lawas bulan Maret 2016
10. Sonahia Gea dari Partai Golkar Kabupaten Nias Utara bulan September 2016
11. Taufik Fatizaro gulo, SE dari Partai Golkar Kabupaten Nias Barat bulan Januari 2016
12. H. Taufiq Agustian Azhar, SE dari Partai Golkar Kota Tanjung Balai bulan April 2016
13. Toga Mangapul Simarmata dari Partai Gerindra Kabupaten Labuhan Batu Selatan bulan April 2016
14. Wagini dari Partai Gerindra Kabupaten Asahan bulan Oktober 2016
15. Wali Usman dari Partai Hanura Kabupaten Serdang Bedagai bulan November 2016

Peraturan Pemerintah Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada pasal 102 disebutkan Anggota DPRD berhenti antar waktu dikarenakan :

1. Meninggal dunia
2. Mengudurkan diri
3. Diberhentikan

Untuk melihat sejauh mana perbandingan target maupun pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan pada sasaran kedua ini, dapat kita lihat pada table berikut ini:

**Perbandingan Target Renstra SKPD / IKU dengan Target Yang Ditetapkan
Dalam Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) SKPD Bakesbangpol Linmas Provsu Tahun
2014**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET Renstra / IKU	TARGET Perjanjian Kinerja (PK) 2014	Realisasi 2014	Presentase
Meningkatnya Pemahaman Politik dan Berorganisasi Masyarakat	Jumlah LSM / Ormas / OKP Yang Mendapatkan pembinaan	400 Ormas/ LSM / OKP	100 Ormas / LSM / OKP	100 Ormas / LSM / OKP	100 %
	Jumlah Parpol Yang Mendapatkan Pembinaan	12 Parpol	12 Parpol	11 Parpol	91,66 %

**Perbandingan Target Renstra SKPD / IKU dengan Target Yang Ditetapkan
Dalam Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) SKPD Bakesbangpol Linmas Provsu Tahun
2015**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET Renstra / IKU	TARGET Perjanjian Kinerja (PK) 2015	Realisasi 2015	Presentase
Meningkatnya Pemahaman Politik dan Berorganisasi Masyarakat	Jumlah LSM / Ormas / OKP Yang Mendapatkan pembinaan	400 Ormas/ LSM / OKP	400 Ormas / LSM / OKP	260 Ormas / LSM / OKP	65 %

	Jumlah Parpol Yang Mendapatkan Pembinaan	12 Parpol	11 Parpol	11 Parpol	100 %
--	--	-----------	-----------	-----------	-------

Perbandingan Target Renstra SKPD / IKU dengan Target Yang Ditetapkan Dalam Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) SKPD Bakesbangpol Linmas Provsu Tahun 2016

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET Renstra / IKU	TARGET Perjanjian Kinerja (PK) 2016	Realisasi 2016	Presentase
Meningkatnya Pemahaman Politik dan Berorganisasi Masyarakat	Jumlah LSM / Ormas / OKP Yang Mendapatkan pembinaan	400 Ormas/ LSM / OKP	100 Ormas / LSM / OKP	100 Ormas / LSM / OKP	100 %
	Jumlah Parpol Yang Mendapatkan Pembinaan	12 Parpol	11 Parpol	11 Parpol	100 %

Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa dari indikator yang mendukung tercapainya Sasaran Strategis Meningkatkan Pemahaman Politik dan Berorganisasi Masyarakat untuk tahun 2016 dapat tercapai.

❖ SASARAN KETIGA : TERCIPTANYA STABILITAS KEAMANAN DAN KENYAMANAN WILAYAH SUMATERA UTARA

Untuk Sasaran Ketiga ini ada 7 (tujuh) kegiatan yang menjadi target dengan indikator Jumlah Kegiatan Dalam Rangka Deteksi Dini dan Cegah Dini Konflik. Dari 7 (tujuh) target kegiatan yang ditetapkan pada sasaran ini terealisasi semua. Keseluruhan kegiatan terdapat pada Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dan Program

Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan. Untuk melihat sejauh mana pelaksanaan kegiatan berikut akan dijelaskan tentang pelaksanaan Program dan Kegiatan yang menunjang sasaran ini:

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan terdapat 6 (enam) kegiatan:

- Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Kapasitas Kemampuan Intelijen Dasar bagi Aparat kesbangpol Provinsi dan Kab/Kota se Sumatera Utara.
- Rapat Koordinasi (rakorda) kesbangpol dan Linmas, Kominda, FKDM, Fpk, FKUB, Provinsi, Kab/Kota se Sumatera Utara.
- Penggalangan Cipta Kondisi Keamanan Sumatera Utara
- Diskusi Publik dalam rangka Pemecahan Isu – isu Aktual.
- Pemberdayaan FKDM Provinsi Sumatera Utara sesuai Permendagri 12 tahun 2006.
- Pemberdayaan Kegiatan Orang Asing, NGO, LSM Asing dan Lembaga Asing.

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan terdapat 1 (satu) kegiatan:

- Pelaksanaan Koordinasi Konflik Sosial.

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan terdapat 5 (lima) kegiatan

- [Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Kapasitas Kemampuan Intelijen Dasar bagi Aparat kesbangpol Provinsi dan Kab/Kota se Sumatera Utara.](#)

Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Kapasitas Kemampuan Intelijen Dasar ini dalam rangka meningkatkan upaya deteksi dini dan cegah dini terhadap setiap gangguan dan potensi konflik dalam masyarakat, mewujudkan jiwa patriot, Nasionalisme yang tinggi dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mampu menjadi mata dan telinga, temu cepat dan lapor cepat sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam mengambil kebijakan. Yang dilaksanakan pada hari Senin – Kamis tanggal 5 – 8 Desember 2016 di Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP) Jl. Williem Iskandar / Jl. Rumah Sakit Haji Medan. Adapun peserta yang di Undang dari Aparatur Badan Kesbangpol Provinsi, Kab/Kota se Sumatera Utara sebanyak 42 orang, Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara sebanyak 10 orang. Dengan Narasumber :

1. Kolonel Inf. Bambang H
2. Kapten Abner Sihombing
3. Serda Supriadi
4. Sertu Tri Setiaji
5. Kapten Inf. Slamet H
6. Lettu Inf. M. Yusuf
7. Kapten Edi Susanto

- [Rapat Koordinasi \(Rakorda\) kesbangpol dan Linmas, Kominda, FKDM, FPK, FKUB, Provinsi, Kab/Kota se Sumatera Utara.](#)

Rakor ini untuk meningkatkan Koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas tugas pokok dan fungsi Kesbangpol, Kominda, dan Forum – forum strategis sebagai mitra Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam memelihara ketentraman, ketertiban dan perlindungan Masyarakat Sumatera Utara yang dilaksanakan Hari Kamis 29 September 2016 di Hotel Polonia Jln. Sudirman Medan tema “Optimalisasi peran dan fungsi Kesbangpol, Kominda dan Forum – forum strategis dalam memelihara ketertiban dan ketentraman Masyarakat di Sumatera Utara” dengan mengundang peserta 300 orang. Narasumber yang diundang pada kegiatan tersebut adalah :

1. Gubernur Sumatera Utara.
2. Brigjen. Sungkono Kabinda
3. Mayjen Purn. Samsuddin
4. Plt. Kaban Kesbangpol dan Linmas Provsu.

- [Diskusi Publik dalam rangka Pemecahan Isu – isu Aktual.](#)

Kegiatan ini pada tahun 2016 dilaksanakan 3 (tiga) kali dengan mengambil tema yang berbeda – beda, dan untuk pelaksanaan kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kegiatan pertama dilaksanakan di Aula Bina Graha Bapeddasu Medan tanggal 29 April 2016 dengan tema “Pertemuan Silaturahmi Menyongsong Peringatan Hari Buruh yang damai di Sumatera Utara. Adapun hasil dari kegiatan ini adalah :

- ✓ Pekerja Buruh yang datang untuk menyampaikan aspirasi di kantor-kantor pemerintahan atau kantor wakil rakyat, harus diterima dengan baik dan aspirasi tersebut agar ditanggapi dan di respon dengan cepat.
- ✓ Diharapkan agar Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara, harus tetap konsisten berada di tengah antara Buruh dan Pengusaha.
- ✓ Diharapkan agar Apindo dan Asosiasi Buruh dapat melakukan komunikasi yang intens untuk menyelesaikan setiap masalah yang terjadi.
- ✓ Bukan hanya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi saja, tapi semua elemen Pemerintah Daerah di Sumatera Utara, harus mampu menjadi penengah antara buruh dan pengusaha.
- ✓ Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten/ Kota harus lebih cepat tanggap dalam mengatasi masalah-masalah yang terjadi antara buruh dan pengusaha, jangan dibiarkan berlarut-larut agar tidak menjadi bumerang.

Narasumber yang diundang pada kegiatan tersebut adalah :

- Ketua Pengurus Serikat Pekerja Buruh.
- Pengurus APINDO.
- Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provsu.
- Kapoldasu (di wakili oleh Dir Intelkam Poldasu dan Dir Bimas SU)





2. Kegiatan kedua bersifat Rapat Koordinasi yang membahas tentang Penanganan Issue-
issue Actual di Provinsi Sumatera Utara yang di Hotel Grand Kanaya Medan pada hari
Rabu tanggal 28 September 2016.
3. Kegiatan ketiga dilaksanakan di Balai Kartini Kota Tebing Tinggi tanggal 20 Oktober
2016 tema “Terciptanya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) damai di Kota Tebing
Tinggi” Adapun Narasumber nya kegiatan ini adalah :
 - Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional (Kesbangpol Provsu)
 - Kabinda (di wakili Kol. R. Andi)
 - Fajar rudi manurung,SH, MH (Ass.Intel Kejari Tebing Tinggi)
 - AKBP. Ciceucahyati dwi melati SH, MH (Kpolres Tebing Tinggi)
 - Zulkifli taufik, SH, M.Hum (Plt. Kaban Kesbangpol Provsu)
- [Pemberdayaan FKDM Provsu sesuai Permendagri 12 Tahun 2006](#)

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dibentuk berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2006, dan di Sumatera Utara pengurus Forum ini baru dilantik dan dipilih kembali pada tahun 2016 yang lalu. Untuk kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2016 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kegiatan pertama dilaksanakan hari Kamis 13 Oktober 2016 di AULA KANTOR
WALIKOTA GUNUNG SITOLI dengan tema “Terciptanya Situasi yang Kondusif di
Wilayah Pulau Nias Provinsi Sumatera Utara” mengundang peserta dari Kaban/Kakan
Kesbangpol, Camat, Ketua dan Seketaris beserta 2 Orang Anggota FKDM Kab/Kota.
Narasumber yang diundang pada kegiatan tersebut adalah :

- Plt. KEPALA KESBANGPOL DAN LINMAS PROVINSI SUMATERA UTARA
 - WALIKOTA GUNUNG SITOLI.
 - KETUA FKDM PROVINSI SUMATERA UTARA.
 - KAPOLRES NIAS.
 - DANDIM NIAS.
2. Kegiatan kedua dilaksanakan hari Selasa 18 Oktober 2016 di AULA RAJA BAHAGIA RESTO Tanjung Balai dengan tema “ TERCIPTANYA SITUASI YANG KONDUSIF DI PROVINSI SUMATERA UTARA “ mengundang peserta dari Kaban/Kakan Kesbangpol, Camat, Ketua dan Seketaris beserta 2 Orang Anggota FKDM Kab/Kota. Narasumber yang diundang pada kegiatan tersebut adalah :
- WAKIL WALI KOTA TANJUNG BALAI.
 - Plt. KEPALA KESBANGPOL DAN LINMAS PROVINSI SUMATERA UTARA
 - ANGGOTA FKDM PROVINSI SUMATERA UTARA.
 - KAPOLRES TANJUNG BALAI
 - DANDIM ASAHAN.
- [Pemantauan Kegiatan Orang Asing, NGO LSM Asing dan Lembaga Asing.](#)

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan terdapat 1 (satu) kegiatan:

- [Pelaksanaan Koordinasi Konflik Sosial.](#)



Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Beringin Kantor Gubernur Sumatera Medan tanggal 21 Juli 2016 dengan peserta yang hadir 37 orang. Adapun hasil dari dilaksanakannya Koordinasi ini adalah :

- Tanah-tanah eks HGU bakalan menjadi konplik sosial kedepan
- Penyampaian laporan agar dapattepat waktu.
- Bahan untuk penyusunan laporan agar disampaikan kepada peserta rapat. Kegiatan yang dilaksanakan masing-masing agar disampaikan ke Bakesbangpol linmas Provsu dan tembusan disampaikan ke Kodam I/BB.
- Agar email Bakesbangpol disampaikan kepada peserta.
- Agar ditugaskan Operator untuk mengambil data/input data

**Perbandingan Target Renstra SKPD / IKU dengan Target Yang Ditetapkan
Dalam Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) SKPD Bakesbangpol Linmas Provsu Tahun
2014**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET Renstra / IKU	TARGET Perjanjian Kinerja (PK) 2014	Realisasi 2014	Presentase
Terciptanya Stabilitas Keamanan dan Kenyamanan Wilayah Sumatera Utara	Jumlah Kegiatan Dalam Rangka Deteksi Dini dan Cegah Dini Konflik	45 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	100 %

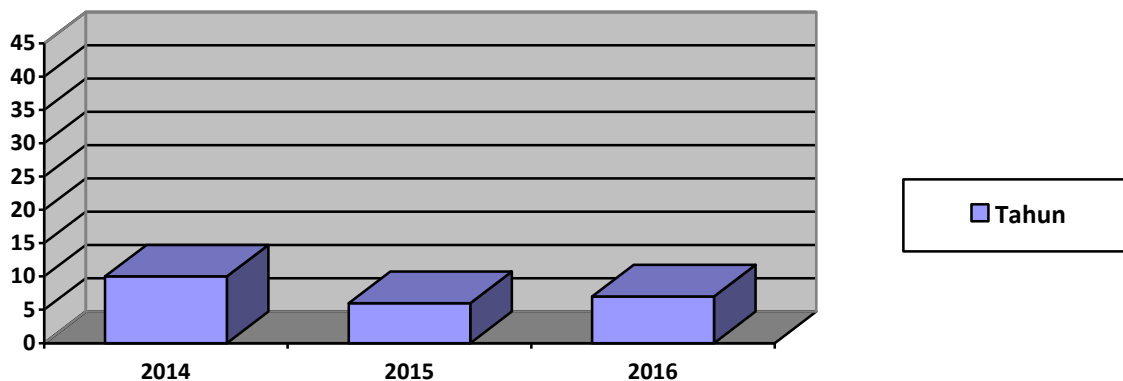
**Perbandingan Target Renstra SKPD / IKU dengan Target Yang Ditetapkan
Dalam Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) SKPD Bakesbangpol Linmas Provsu Tahun
2015**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET Renstra / IKU	TARGET Perjanjian Kinerja (PK) 2015	Realisasi 2015	Presentase
Terciptanya Stabilitas Keamanan dan Kenyamanan Wilayah Sumatera Utara	Jumlah Kegiatan Dalam Rangka Deteksi Dini dan Cegah Dini Konflik	45 Kegiatan	7 Kegiatan	6 Kegiatan	85,71 %

**Perbandingan Target Renstra SKPD / IKU dengan Target Yang Ditetapkan
Dalam Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) SKPD Bakesbangpol Linmas Provsu Tahun
2016**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET Renstra / IKU	TARGET Perjanjian Kinerja (PK) 2016	Realisasi 2016	Present ase
Terciptanya Stabilitas Keamanan dan Kenyamanan Wilayah Sumatera Utara	Jumlah Kegiatan Dalam Rangka Deteksi Dini dan Cegah Dini Konflik	45 Kegiatan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	100 %

Secara keseluruhan pada umumnya target yang dilaksanakan dapat dilaksanakan sebagaimana yang telah diperjanjikan akan tetapi kedepannya perlu optimalisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan sehingga kegiatan yang dilaksanakan benar – benar dirasakan oleh masyarakat Sumatera Utara. Untuk melihat perbandingan pencapaian realisasi pada sasaran Terciptanya Stabilitas Keamanan dan Kenyamanan Wilayah Sumatera Utara dari tahun 2014 sd 2016 dapat dilihat dari data berikut:



Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa ada perbedaan realisasi target setiap tahunnya, untuk tahun anggaran 2014 seluruh kegiatan yang diperjanjikan dapat terlaksana dan tingkat pencapaian target IKU lebih besar dibandingkan tahun 2015 dan 2016, akan tetapi pada tahun 2015 dari 7 (tujuh) target yang diperjanjikan ada 1 kegiatan yang tidak

terlaksana dikarenakan ada penambahan anggaran pada P.APBD pada salah satu kegiatan yang diperjanjikan sedangkan penetapan P.APBD dilaksanakan di akhir tahun anggaran sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan, untuk tahun 2016 ada 7 kegiatan yang menjadi target dan seluruhnya dapat terlaksana. Disamping itu sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa pada tahun 2014 dan 2015 ada Program yang mendukung pencapaian lebih dari 1 (satu) sasaran sedangkan pada tahun 2016 1 (satu) Program hanya mendukung pencapaian 1 (satu) sasaran.

Untuk melihat sejauh mana pencapaian target maupung perbandingan atara dokumen Renstra SKPD dengan Target Yang Ditetapkanakan Dalam Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) SKPD Bakesbangpol Linmas Provsu setiap tahunnya akan dijelaskan pada tabel berikut ini :

Perbandingan Target Renstra SKPD dengan Realisasi Yang Dilaksanakan sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) SKPD Bakesbangpol Linmas Provsu dari tahun 2014 - 2016

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kondisi Awal 2013	TARGET Renstra	TARGET Perjanjian Kinerja (PK) 2014	TARGET Perjanjian Kinerja (PK) 2015	TARGET Perjanjian Kinerja (PK) 2016
Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Akan Nilai - Nilai Kebangsaan	Jumlah Kegiatan Dalam Rangka Pembinaan Wawasan Kebangsaan	13 Kegiatan	47 Kegiatan	11 Kegiatan	8 Kegiatan	9 Kegiatan
Meningkatnya Pemahaman Politik dan Berorganisasi Masyarakat	Jumlah LSM / Ormas / OKP Yang Mendapatkan Pembinaan	75 LSM / Ormas / OKP	400 LSM / Ormas / OKP	400 LSM / Ormas / OKP	400 LSM / Ormas / OKP	100Ormas/ LSM
	Jumlah Parpol Yang Mendapatkan Pembinaan	16 Parpol	12 Parpol	12 Parpol	11 Parpol	11 Parpol
Terciptanya Stabilitas Keamanan dan	Jumlah Kegiatan Dalam Rangka Deteksi Dini	11 Kegiatan	45 Kegiatan	10 Kegiatan	7 Kegiatan	7 Kegiatan

Kenyamanan Wilayah Sumatera Utara.	dan Cegah Dini Konflik					
	Terbentuknya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)		33 Kab / Kota			
	Terbentuknya Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di Kab / Kota		33 Kab / Kota			

Pergub 48 Tahun 2015 Tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemprov

B. Realisasi Anggaran

Untuk tahun 2016 alokasi anggaran SKPD Badan Kesbangpol Linmas Provsu sebesar Rp. 19.675.182.000 terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp. 11.407.320.000 dan Belanja tidak langsung sebesar Rp.8.267.862.000 dan terealisasi sebesar Rp15.961.963.496 atau 81,12 % dengan rincian realisasi belanja langsung Rp 11.407.320.000 dan realisasi Belanja tidak langsung sebesar Rp.8.267.862.000. Keseluruhan belanja langsung tersebut dipergunakan untuk mendukung seluruh Program dan Kegiatan di tahun 2016.

Seperti yang disampaikan pada Bab sebelumnya bahwa dalam Perjanjian Kinerja (PK) Bakesbangpol Linmas Provsu tahun 2016, ada 3 (tiga) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator, alokasi anggaran dan realisasi masing – masing sasaran dapat terlihat dijelaskan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Akan Nilai – Nilai Kebangsaan

Pada sasaran ini indikator yang digunakan adalah Jumlah Kegiatan Dalam Rangka Pembinaan Wawasan Kebangsaan. Adapun alokasi dana yang disediakan untuk menunjang sasaran ini terbagi dalam 2 (dua) Program yakni:

- Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan alokasi anggaran Rp. **2,650,000,000** (dua milyar enam ratus lima puluh juta rupiah). Untuk realisasi

anggaran pada Program ini sebesar Rp.2,650,000,000,- atau terealisasi sebesar Rp.2.086.486.199,- atau 78,73 % Pada Program ini ada 7 (tujuh) kegiatan yakni :

- ✓ Sosialisasi Pemantapan 4 Konsensus Dasar Nasional bagi kaum Perempuan dengan anggaran Rp.100.000.000,- terealisasi Rp94.870.000,- atau 94,87 %
- ✓ Dialog Peran Gender dalam mengantisipasi Bahaya Narkoba, judi, Prostitusi dan Penyakit Masyarakat dengan Anggaran Rp100.000.000,- terealisasi Rp.89.545.000,- atau 89,54 %
- ✓ Media Pembauran Kebangsaan dengan Anggaran Rp200.000.000,- terealisasi Rp.199.997.900,- atau 99,99 %
- ✓ Forum Dialog Penguatan 4 Konsensus Dasar Nasional bagi Siswa/i dan Mahasiswa Sumut dengan Anggaran Rp100.000.000,- terealisasi Rp.100.000.000,- atau 100%
- ✓ Fasilitasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Rp150.000.000,- terealisasi Rp.96.306.000,- atau 64,20 %
- ✓ Pembinaan dan Peningkatan Pembauran melalui Pemberdayaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provsu dengan Anggaran Rp550.000.000,- terealisasi Rp.539.536.815,- atau 98,09%
- ✓ Pembinaan dan Peningkatan Kerukunan Umat Beragama melalui Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provsu dengan Anggaran Rp.900.000.000,- terealisasi Rp.583.296.884,- atau 64,81 %
- ✓ Pembinaan Fasilitasi Tim Pemantau dan Evaluasi Pengembangan Pelestarian Budaya Daerah Provsu dengan Anggaran Rp550.000.000,- terealisasi Rp.382.933.600,- atau 69,62 %
- Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan dengan alokasi anggaran Rp.650.000.000,- Untuk realisasi anggaran pada Program ini adalah sebesar Rp.557.872.108,- atau 85,82 %. Pada Program ini ada 2 (dua) kegiatan yang ditujukan untuk mencapai 2 sasaran yaitu :
 1. Sasaran pertama Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Akan Nilai – Nilai Kebangsaan dengan kegiatan :
 - ✓ Peningkatan Kesadaran Bela Negara dengan Anggaran Rp 250.000.000,-, terealisasi Rp.191.920.000,- atau 76,76 %

2. Sasaran kedua Terciptanya Stabilitas Keamanan dan Kenyamanan Wilayah Sumatera Utara dengan kegiatan :

- ✓ Pelaksanaan Koordinasi Konflik Sosial dengan Anggaran Rp400.000.000,- teralisasi Rp.365.952.108,- atau 91,48 % 557872108
- Program Pendidikan Politik Masyarakat dengan alokasi anggaran Rp.900.000.000,- Untuk realisasi anggaran adalah sebesar Rp.529.316.755,- atau 58,81%. Pada Program ini ada 4 (empat) kegiatan yaitu :
 - ✓ Seri Dialog Demokrasi dengan anggaran Rp300.000.000,- teralisasi Rp.248.197.360,- atau 82,73 %
 - ✓ Pendidikan Politik bagi Kader-kader PKK dan Organisasi Wanita dengan Anggran Rp100.000.000,- teralisasi Rp.90.524.680,- atau 90,52 %
 - ✓ Penguatan Kelompok Kerja Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia Indonesia Provsu dengan Anggran Rp150.000.000,- teralisasi Rp.126.270.065,- atau 84,18 %
 - ✓ Verifikasi PAW Anggota DPRD Kab / Kota se Sumut dengan Anggaran Rp.30.000.000,- teralisasi Rp.64.324.650,- atau 200,14 %
- Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan Alokasi Anggaran Rp.4.600.000.000,-.Untuk realisasi anggaran adalah sebesar Rp.1.570.518.055,- atau terealisasi sebesar 34 %.
 - ✓ Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Kapasitas Kemampuan Intelijen Dasar bagi Aparat kesbangpol Provinsi dan Kab/Kota se Sumatera Utara dengan Anggaran Rp200.000.000,- teralisasi Rp.182.686.336,- atau 91,34 %
 - ✓ Rapat Koordinasi (rakorda) kesbangpol dan Linmas, Kominda, FKDM, Fpk, FKUB, Provinsi, Kab/Kota se Sumatera Utara dengan Anggaran Rp150.000.000,- teralisasi Rp.254.248.283,- atau 100,69 %
 - ✓ Penggalangan Cipta Kondisi Keamanan Sumatera Utara dengan Anggaran Rp250.000.000,- teralisasi Rp.256.997.150,- atau 100,02%
 - ✓ Diskusi Publik dalam rangka Pemecahan Isu – isu Aktual dengan Anggaran Rp250.000.000,- teralisasi Rp243.397.520,- atau 97,35%

- ✓ Pemberdayaan FKDM Provinsi Sumatera Utara sesuai Permendagri 12 tahun 2006 dengan Anggaran Rp500.000.000,- teralisasi Rp 298.537.716,- atau 59,70 %
- ✓ Pemberdayaan Kegiatan Orang Asing, NGO, LSM Asing dan Lembaga Asing dengan Anggaran Rp150.000.000,- teralisasi Rp.91.253.900,- atau 60,83 %

Khusus program ini, tidak optimalnya daya serap dikarenakan ada kegiatan yang tidak dilaksanakan sama sekali, karena anggaran untuk kegiatan tersebut ditampung pada dana APBN sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

BAB IV

PENUTUP

Dari hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2016 terdapat beberapa permasalahan sebagai bahan evaluasi untuk tahun – tahun mendatang, yakni :

- Pelaksanaan kegiatan dapat dimulai sejak triwulan I sehingga pelaksanaan kegiatan dapat lebih optimal dan tidak terkesan terburu – buru.
- Apabila memungkinkan agar diadakan revisi terhadap dokumen Renstra maupun Indikator Kinerja Utama karena target yang ditetapkan terlalu tinggi dan sulit untuk mencapai target tersebut di tiap tahun anggaran.

Atas permasalahan tersebut dan mengingat tahun APBD Tahun Anggaran 2017 sudah ditetapkan diharapkan pelaksanaan kegiatan dapat dimulai sejak triwulan I dan atas prestasi dan kinerja yang telah berjalan dengan baik dapat dilanjutkan bahkan ditingkatkan sedangkan kekurangan yang terjadi di tahun – tahun sebelumnya agar menjadi bahan perbaikan dan koreksi demi terwujudnya "Provinsi Yang Berdaya Saing Menuju Sumatera Utara Utara Sejahtera". Demikian Laporan Kinerja Badan Kesbangpol Linmas Provinsi

Sumatera Utara Ta. 2017 ini kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS
PROVINSI SUMATERA UTARA



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA
**BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 361 Telepon 4524894 – 4557009
Fax. (061) 4527480 Medan 20119

Medan , 2017

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Laporan Kinerja (LK) .- di
Tempat.-

Kepada Yth :
Biro Organisasi Setda Provsu

Sehubungan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 2016 perihal Penyampaian Laporan Kinerja (LK) Tahun 2016 dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 telah ditentukan jadwal untuk penyerahan Laporan Kinerja (LK) dari masing – masing SKPD.

Berkenaan hal tersebut, dengan ini disampaikan Laporan Kinerja (LK) Tahun 2016 dari Badan Kesbangpol Linmas Provsu yang telah diawali dengan Asistensi Laporan Kinerja (LK) pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 di Biro Organisasi Setda Provsu.

Demikian disampaikan untuk urusan selanjutnya dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

SEKRETARIS BADAN KESBANG POL DAN
LINMAS PROVINSI SUMATERA UTARA

ZULKARNAIN RANGKUTI,S.Sos
PEMBINA TK - I
NIP. 19600628 198103 1 002



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 361 Telepon 4524894 – 4557009
Fax. (061) 4527480 Medan 20119

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

TIM LAPORAN KINERJA BADAN KESBANGPOL LINMAS PROVSU

TAHUN ANGGARAN 2017

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesbangpol Linmas Provsu untuk tahun anggaran 2017. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja adalah benar dan menjadi tanggungjawab kami.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa Laporan Kinerja ini telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal – hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keabsahan informasi yang disajikan didalam Laporan Kinerja ini.

Medan, 2017

Ketua Tim Laporan Kinerja
Badan Kesbangpol Linmas Provsu
Sekretaris

Zulkarnain Rangkuti,S.Sos
Pembina
Nip. 19600628 198103 1 002